

POLITIK DAN PROYEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Aleksander Dancar

Universitas Gregoriana Roma-Italia
e-mail: aleksdancar@gmail.com

Abstract: Politics And Social Welfare Project. Phenomena which appear in the arena of "politics in the province" is the absence of well-being fairly evenly impact on everyone in the political sphere. Who suffered precisely the welfare of those who hold the responsibility for the welfare of others according to the framework triad politics (government/bureaucrats, politicians, and law enforcement). The other is the people. They are considered to be prosperous in life, and through their political efforts are made to prosper. Politics conceived and organized as an attempt to give, create, or at least seek welfare. One logical assumption here is that "they are in politics" (*zoon politikon*) it is the people who already have well-being, or at least having the ability to promote the welfare of it. Therefore, one can not give what he does not have. To be able to give, one must already have something that will be given.

Keywords: politics, projects, social welfare, NTT

Abstrak: Politik Dan Proyek Kesejahteraan Sosial. Fenomena yang tampak dalam kancah "politik di NTT" adalah tidak adanya dampak kesejahteraan yang cukup merata pada semua orang dalam lingkup politik itu. Yang mengalami kesejahteraan justru mereka yang memegang tanggung jawab bagi kesejahteraan orang lain menurut kerangka trias politika (pemerintah/birokrat, politisi, dan penegak hukum). Yang lain adalah rakyat. Merekalah yang dianggap tidak sejahtera dalam hidup, dan melalui politik mereka diusahakan untuk sejahtera. Politik dipahami dan diselenggarakan sebagai upaya untuk memberi, menciptakan, atau paling kurang mengusahakan kesejahteraan. Satu pengandaian logis di sini adalah bahwa "mereka yang berpolitik" (*zoon politikon*) itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kesejahteraan, atau paling kurang memiliki kemampuan untuk mengusahakan kesejahteraan itu. Sebab, seseorang tidak dapat memberi dari apa yang tidak ia punyai. Untuk dapat memberi, seseorang harus sudah memiliki sesuatu yang akan diberikan.

Kata Kunci: politik, proyek, kesejahteraan sosial, NTT

PENDAHULUAN

Sejak zaman Yunani kuno, politik telah menjadi satu sistem kerja sama untuk mencapai kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum dalam apa yang biasa disebut *polis* (negara kota). Plato (428–348 SM) dengan negara idealnya, menginginkan sebuah *polis* yang dipimpin oleh seorang raja-filsuf, dengan cita-cita keadilan, kebaikan, dan kepentingan bersama dapat diwujudkan (Schmandt, 2002:64–76). Aristoteles (384–322 SM) terus melengkapi pemikiran Plato dengan mengembangkan gagasan tentang *zoon politikon*, yang mengafirmasi keterlibatan dan tanggung jawab setiap pribadi (warga *polis*) dalam mengusahakan kesejahteraan sosial

(Rapar, 1988:42–44). Pemikiran-pemikiran politik Barat dari abad pertengahan, seperti dari Thomas Aquinas (1226–1227) yang menerjemahkan dan memperdalam pemikiran politik Aristoteles, sampai zaman modern, seperti dari Jhon Locke (1632–1704), Jean Jacques Rousseau (1712–1778), hampir pasti bermuara pada wacana tentang kesejahteraan sosial. Thomas Aquinas, misalnya, berbicara tentang politik sebagai sistem pelayanan demi mencapai kebahagiaan dan kebaikan bersama (Schmandt, 2002:199). Jhon Locke mengingatkan negara untuk tidak berperan reduktif terhadap hak-hak individu karena negara ada justru untuk memfasilitasi kesejahteraan semua individu dalam negara (Schmandt, 2002:336–

338). Rousseau juga mempertegas peran negara sebagai wadah pembebasan bagi semua warga, sehingga semua orang dalam negara dapat hidup menurut kodrat/alamnya (*the state of nature*) yang baik adanya (Schmandt, 2002:390–400). Singkatnya, kesejahteraan sosial, seluruh warga, merupakan inti-tujuan dari sistem politik di manapun di dunia; politik merupakan proyek kesejahteraan sosial.

Walaupun demikian, dalam praksis politik, apa yang disebut "inti" itu kadang-kadang tidak atau kurang dialami atau dirasakan, bahkan juga banyak orang mengalami hal yang terbalik dengan tujuan itu. Paling kurang dalam sejarah politik tertentu, ada pengalaman ketidakadilan dalam mengalami tujuan negara/politik itu. Warga *polis* Yunani, misalnya, tidak mengalami keadilan itu selama *polis* berada di bawah kekuasaan para tiran; warga Jerman-Yahudi, tidak mengalami keadilan, bahkan kehilangan seluruh diri mereka, selama politik Jerman di bawah kekuasaan Nazisme Hitler; banyak masyarakat Irak tidak mengalami ketentraman sejati di bawah kendali Politik bengis Saddam Hussein; dan masyarakat Indonesia, selama 32 tahun, mengalami tekanan dan kehilangan kebebasan, kebenaran, dan keadilan dalam genggam kekuasaan otoritarian Soeharto. Ketidakadilan itulah yang mendasari pemikiran politik sejumlah pemikir yang terkesan "menolak" dan menilai negara dan politik secara sangat negatif, seperti Thomas Hobbes melihat negara sebagai *Leviathan*, sejenis makhluk ganas pemakan makhluk hidup lainnya, atau Karl Marx (1818–1883) melihat negara sebagai instrumen di tangan segelintir kaum borjuis untuk menindas begitu banyak manusia proletar. Militanisme politik Marx muncul dari ketidakadilan yang diamatinya dalam proses industrialisme Inggris, di mana banyak pekerja, juga anak-anak dan kaum wanita, mati karena penindasan dan kelaparan di gua-gua tambang batu bara di Inggris ("Revolusi Inggris" http://www.e-dukasi.net/mo_full.php?moid=104&fname=sej201_07.htm).

MENDEKONSTRUKSI ZOON POLITIKON

Zoon Politikon. Demikian Aristoteles menyebut hakikat eksistensial manusia sebagai makhluk berpolitik. Hakikat itu dijadikannya sebagai dasar untuk merasionalisasi *polis* Yunani, dan dengan demikian, eksistensi polis diperteguh, tuntutan keterlibatan dan tanggung jawab untuk *polis* pun menjadi sebuah keharusan bagi setiap individu yang merdeka (Rapar, 1988:71). *Polis* lalu diidentikkan dengan wadah kebersamaan dan tuntutannya pun dianggap

sejajar dengan tuntutan kodrati manusia sebagai makhluk yang seharusnya hidup bersama dengan yang lain.

Penyejajaran polis dengan kodrat sosial manusia terus dipegang teguh dalam sejarah bangsa-bangsa dunia, bahkan semakin diperteguh oleh refleksi-refleksi rasional modern, yang mengafirmasi dan mengembangkan polis sampai kepada konsep-konsep kenegaraan modern. Negara dan hidup bernegara lalu dipikirkan dan diwartakan sebagai keharusan bagi setiap individu, dan tidak ada ruang lagi bagi setiap individu untuk hidup tanpa negara (bdk. Konsep Negara dari Hegel, 1770–1831) (Schmandt, 2002:497). Negara didefinisikan sebagai "yang lain" yang adalah satu sisi yang tak terpisahkan dari "aku"-nya setiap pribadi.

Tentu tak satu pun manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa orang lain. Secara primordial, hal itu merupakan kebutuhan absolut setiap pribadi, dan gugatan, apalagi penolakan terhadapnya tidak hanya mengungkapkan kekonyolan melainkan sebuah keganjilan yang tidak pernah muncul dari seorang yang sempurna sebagai manusia. Ya, setiap orang seharusnya menerima dan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Namun, orang lain yang harus diterima dan dibutuhkan oleh setiap individu bukanlah yang tanpa batas dan tanpa seleksi. Semua orang membutuhkan orang lain, tetapi bukan semua orang dibutuhkan oleh seseorang dalam dan untuk hidupnya. Setiap individu mempunyai batas keturunan (wangsa), geografi (wilayah), dan ideologi, juga mempunyai kemampuan untuk menyeleksi kepentingan-kepentingannya. Dalam batas-batas dan dengan seleksi-seleksi itulah setiap orang menerima dan membutuhkan orang lain (Murder, 1999:121–126).

Karena itu, *zoon politikon* sebagai kodrat, sesungguhnya tidak mengungkapkan kebutuhan setiap orang akan yang lain, tetapi merupakan sebuah batasan afirmatif akan tuntutan tanggung jawab setiap orang akan yang lain. Makna *zoon politikon* adalah tanggung jawab, bukan kebutuhan akan masyarakat. Karena itu, *zoon politikon* merujuk pada kemampuan-kemampuan diri setiap orang, dengannya orang bisa melakukan, menciptakan, dan menghasilkan sesuatu bagi diri dan orang lain. Diri yang kreatif dan produktif adalah *zoon politikon* sejati, dan inilah yang dapat membentuk kehidupan sosial-politik yang progresif dan sejahtera.

Zoon Politikon dalam Sketsa Modernisme

Makna otentik *zoon politikon* secara tajam terungkap dalam sejarah modernisme yang digerakkan

secara revolusioner oleh para pemikir dan inovator Revolusi Inggris (1640). Francis Bacon, Rene Descartes, Galileo Galilei, dan Issac Newton sebagai tokoh-tokoh terkemuka dalam revolusi ilmu pengetahuan adalah pribadi-pribadi historis yang penuh dengan ketekunan memacu kemampuan diri untuk dapat menemukan dan menghasilkan sesuatu ("Revolusi Inggris": http://www.e-dukasi.net/mo_full.php?moid=104&fname=sej201_07.htm). Dengan tenang, mungkin juga diam-diam, mereka telah bekerja di belakang hiruk-pikuk massa ketika itu. Mereka betah di rumah, di kantor, di sekolah-sekolah mereka, bertahan duduk di kursi belajar, memikirkan, merancang, dan menciptakan apa yang diperlukan untuk kehidupan umat manusia, yang waktu itu berada dalam kondisi miskin. Mereka menyelami kemampuan diri untuk memunculkan ciptaan bagi yang lain dan bukannya mengejar ciptaan orang lain sambil melupakan diri dan segala kemampuannya.

Karakter *zoon politikon* sejati adalah setia dan tekun bergumul dengan seluruh kemampuan diri secara kreatif dan produktif, belajar hidup dari kekuatan sendiri, dari kreativitas dan produktivitas sendiri. Gaya hidup *zoon politikon* tidak ditentukan oleh apa yang dipakai (hasil karya orang lain), tetapi oleh kesanggupan untuk menciptakan sesuatu bagi yang lain. Thomas New Coman (1712), James Watt (1796), keduanya penemu mesin uap, James Hargreaves-penemu alat pemintal (1765), Richard Arkwright, John Kay, dan Edmund Cartwright-penemu alat tenun (1769 & 1785) adalah beberapa *zoon politikon* modernis sejati yang telah berhasil menjadi inovator yang menggerakkan Revolusi Industri Inggris, sebagai induk semua proses industrialisme mondial dewasa ini ("Revolusi Inggris": http://www.e-dukasi.net/mo_full.php?moid=104&fname=sej201_07.htm). Tokoh-tokoh inilah yang menjadi rahim modernisme. Merekalah *mode* dari modernisme sekaligus *mode* dari kehidupan sosial politik modern. Mereka sekolah untuk belajar dan berpikir tentang dan dari diri mereka, dan bukannya belajar dan berpikir dari orang lain untuk kepentingan sekolah, ijazah, dan kantor-kantor pemerintahan. Mereka setia, sabar, dan tekun menggumuli, mendalami seluruh potensi dan kemampuan diri untuk bekerja, menciptakan sesuatu, dan bukannya setia dan tekun menyusun proposal proyek dan donasi dari orang lain. Mereka senang dan berbangga dengan apa yang mereka kerjakan dan ciptakan, dan bukannya senang, berbangga, apalagi sombong

dengan apa yang mereka pakai dan nikmati dari ciptaan orang lain.

***Zoon Politikon*, Pemimpin, dan Politisi**

Hakikat dari *zoon politikon* adalah bertanggung jawab terhadap kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan orang lain (umum), dan politik merupakan wadah untuk mewujudkan dan memfasilitasi tanggung jawab itu (Rapar, 1988:4). Dalam kerangka politik modern, tanggung jawab itu ada pada para pemimpin dan politisi. Dalam hal ini, para pemimpin dan politisi modern sejajar dengan posisi *zoon politikon* dalam *polis* Yunani. Hal yang membedakannya adalah bahwa para pemimpin dan politisi modern tidak menganggap diri mereka sebagai orang bebas, dan masyarakat sebagai budak-budak mereka.

Para pemimpin dan politisi modern juga secara moral dan intelektual "menolak" *despotisme* dalam kepemimpinan. Despotisme dari kata Yunani *despotiké*, yang menjelaskan relasi antara tuan dan hamba dalam *polis*. Dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan "mastership" (pertuanan) (Rapar, 1988:58). Mereka sanggup bahkan sering mengungkapkan bahwa mereka bukan tuan yang harus dilayani, tetapi merupakan pelayan, bahkan hamba, dari masyarakat. Dalam sumpah-sumpah jabatan saat ritus pelantikan, hal itu biasa diungkapkan. Akhir-akhir ini juga, dalam berbagai pesta pemilihan langsung pemimpin (Negara, Propinsi, Kabupaten), para politisi sekian sering mengungkapkan kemampuan mereka untuk menjadi pembawa dan pencipta kesejahteraan bagi masyarakat. Kemampuan itu juga dinyatakan lewat penakaran kekayaan pribadi, dan kompetensi intelektual para calon.

Walaupun demikian, sikap koruptif para pemimpin dan politisi modern, cukup kuat mengindikasikan adanya *despotisme* dalam politik. *Despotisme* dalam politik kita sekarang bahkan lebih *i-moral* dari *despotisme* kuno, karena, *despotisme* kuno lebih jujur dalam pengungkapannya. Kaum *zoon politikon* secara jujur menyatakan diri sebagai tuan dari pada budak, dan secara jujur pula mereka memerintahkan para budak untuk bekerja demi kepentingan nafkah hidup mereka. Dalam politik modern (termasuk kita di NTT), para pemimpin dan politisi mengatakan persis terbalik dengan yang dikatakan kaum *zoon politikon* kuno, tetapi bertindak sama dengan, bahkan lebih buruk dari, kaum *zoon politikon* kuno itu. Para pemimpin tidak mengatakan diri sebagai tuan, tetapi merekalah tuan dari

kesejahteraan. Para politisi tidak pernah menilai bahwa rakyat adalah budak-budak, tetapi merekalah yang memperbudak rakyat lewat janji-janji politik yang kosong dan manipulatif.

Fenomena politik demikian dengan sendirinya menghapus tesis kuno Socrates (470–399 SM) yang mengatakan bahwa apa yang diketahui oleh individu, itu juga yang dilaksanakannya dalam kehidupan (*intelektualisme moral Socrates*). Pengetahuan moral tidak dengan sendirinya memampukan orang untuk bertindak moral. Dari apa yang dikatakan dalam visi-misi dan janji-janji politik, terungkap dengan cukup jelas bahwa para pemimpin dan politisi memiliki pengetahuan politik yang baik dan benar, sesuai dengan cita-cita demokrasi dan sepadan dengan harapan politik masyarakat. Namun, praktik politik mereka tidak hanya gagal mewujudkan harapan rakyat, tetapi juga menghilangkan harapan itu lewat praktik-praktik korupsi. Menurut Dennis F. Thompson, korupsi merupakan praktik yang sulit dihilangkan dari mental pejabat publik, bukan hanya karena mereka rakus, tetapi juga karena mereka berada dalam struktur pelayanan publik, dengannya mereka dapat melakukan tindakan immoral demi melayani kebaikan publik (Thompson, 2002:1).

Dengan itu, wajah politik kita menjadi sangat munafik, dan tidak seorang pun dapat memulihkannya. Kemunafikan itu ada, tetapi ia selalu tampil di akhir sebuah keputusan dan pilihan, yang tidak dapat diubah kembali sampai batas waktunya untuk berhenti. Itulah rahasia "kejeniusan" kemunafikan politik, yang membuatnya tetap eksis dan selalu sukses dalam menipu keputusan rakyat. Kemunafikan telah menjadi identitas politik dan sumber kekuatan dalam setiap pertarungan merebut kekuasaan. Segala bencana politik, seperti kemiskinan, kebodohan, dan penderitaan, akan terus eksis dan berkembang segaris dengan gerakan kemunafikan itu, dan semua kejahatan politik, seperti korupsi, akan terus menjadi abstrak, seabstak kemunafikan, dan tidak akan pernah dapat dicapai suatu keabsahan hukuman bagi pelaku kejahatan. Kejahatan selalu ada, pencurian, korupsi akan tetap ada, tetapi keadaan itu seperti angin yang terus bertiup yang tidak diketahui asal dan tujuannya tetapi selalu meninggalkan bekas "bencana" pada semua makhluk yang pernah dilewatinya. Dalam atmosfir politik yang munafik, angin kejahatan korupsi, sedahsyat apapun adanya, tetap tidak seorang pun sanggup menangkap dan menggenggamnya.

WAJAH POLITIK DI NTT

Praksis politik yang gagal dan tidak adil tampaknya juga sedang mewarnai wajah politik lokal di NTT. Berbagai data mengenai kemiskinan, kebodohan (buta huruf), kurang gizi, gizi buruk, angka kematian bayi dan "ibu yang melahirkan" yang masih cukup tinggi, dan berbagai isu keterbelakangan lainnya, yang dicatat, ditulis, dan dipublikasikan berbagai media komunikasi yang tentunya berdasarkan penelitian yang *reliable* sudah cukup menjadi indikator valid dari kegagalan atau ketidakadilan itu. Kadang-kadang muncul keraguan sering dari pemimpin atau politisi tentang kebenaran penemuan-penemuan itu. Namun, tanpa suatu penelitian yang sistematis dan metodologis pun dan hanya dengan pengamatan, situasi dan kondisi berbagai kelompok masyarakat di NTT ini memang sangat memprihatinkan. Hanya pemimpin dan politisi yang arogan dan egois saja yang mungkin menolak untuk menerima semua penemuan itu.

Berdasarkan informasi dan data-data media, juga pengamatan pribadi mengenai situasi politik dan kesejahteraan sosial di NTT, saya berani mengungkapkan asumsi ini: bahwa apa yang disebut-sebut orang selama ini sebagai "politik di NTT" tidak memiliki dampak kesejahteraan yang cukup merata pada semua orang dalam lingkup politik itu. Yang mengalami kesejahteraan justru mereka yang memegang tanggung jawab bagi kesejahteraan orang lain menurut kerangka *trias politika* (pemerintah/birokrat, politisi, dan penegak hukum). Yang lain adalah rakyat. Merekalah yang dianggap tidak sejahtera dalam hidup, dan melalui politik mereka diusahakan untuk sejahtera. Politik dipahami dan diselenggarakan sebagai upaya untuk memberi, menciptakan, atau paling kurang mengusahakan kesejahteraan. Satu pengandaian logis di sini adalah bahwa "mereka yang berpolitik" itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kesejahteraan, atau paling kurang memiliki kemampuan untuk mengusahakan kesejahteraan itu. Sebab, seseorang tidak dapat memberi dari apa yang tidak ia punyai. Untuk dapat memberi, seseorang harus sudah memiliki sesuatu yang akan diberikan.

Data-data korupsi di NTT yang cukup kental dengan indikasi keterlibatan birokrat mengungkapkan bahwa banyak orang yang telah masuk dalam "ruang tanggung jawab" politik justru telah "mengambil" kesejahteraan dari mereka yang disebut rakyat (Aditjondro, 2002:7). Pengambilan langsung

dari apa yang dihasilkan rakyat seperti yang dilakukan pemerintah *kolonial* dulu lewat program *kerja paksa (rodi)* dan *tanam paksa (culturstelsel)*, barangkali jarang atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, dengan pendekatan proyek, para pemimpin dan politisi telah banyak mengambil kesejahteraan dari rakyat. Idealisme proyek jelas untuk pemberdayaan rakyat, tetapi rakyat terus tidak berdaya, yang diindikasikan oleh tingginya angka kemiskinan, rendahnya mutu kesehatan dan pendidikan. Ketidakberdayaan rakyat itu malah terus dipolitisir dan seolah-olah diperdagangkan untuk merancang berbagai macam proyek baru yang lebih banyak membuahkan kesejahteraan bagi semua pihak yang mengurus proyek-proyek itu. Lalu, apa bedanya proyek pemerintah *kolonial* dengan proyek pemerintah kita?

Dahulu para penjajah membentuk *koloni-koloni* kekuasaan untuk memecah belah kekuatan rakyat (*divide et impera*) dan mengefektifkan pemaksaan rakyat untuk *bekerja* dan *menanam* ("Ensiklopedi Nasional Indonesia", 2004:222). Walaupun kebanyakan hasilnya dinikmati penjajah, tetapi, rakyat tidak menjadi terasing dari kodrat mereka sebagai makhluk yang bekerja (*homo laborans*). Justeru dengan itu, kekuatan diri mereka sebagai manusia semakin dipertajam sampai akhirnya memunculkan daya perlawanan yang gigih terhadap *kolonialisme* dan membangun kemerdekaan politik.

Politik yang merdeka itu, yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian dibagi-bagi dalam propinsi-propinsi, kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, dan desa-desa, dengan tujuan tunggal, " demi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik". Harapan yang mengalir dalam wacana kehidupan umum bahwa dengan itu makna kemerdekaan semakin dirasakan secara adil dan merata oleh segenap rakyat. Pada tahun 1944 dibentuk Propinsi Sunda Kecil, dengan Ibu Kota Singaraja, dan NTT termasuk di dalamnya. NTT terbentuk sebagai propinsi yang otonom dan sah pada tahun 1958, berdasarkan UU No 64/1958 (Lembaran Negara No 15 tahun 1958). Namun, apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh kebanyakan rakyat di negeri ini? Apa yang dialami oleh sebagian besar rakyat NTT? Kemiskinan. Buta huruf. Gizi buruk dan busung lapar. Pengangguran. Kelaparan. Ketiadaan air bersih. Kekurangan/ketiadaan penerangan yang memadai. Harga hasil pertanian dan peternakan yang tidak stabil dan cenderung

menurun. Harga barang-barang kebutuhan rakyat (yang tidak bisa dihasilkan oleh rakyat sendiri) yang semakin meningkat. Ketidakpastian melanda sebagian besar rakyat. Rakyat hidup dari usaha-usaha spekulatif, untuk "mengintip" rezeki yang mungkin ditawarkan suatu saat oleh para pemilik modal dan pengusaha yang bekerja sama dengan penguasa politik (pemerintah, politisi, dan penegak hukum). Bukankah itu juga yang dialami para rakyat jelata di hadapan para pemerintah *kolonial* dulu?

POLITIK DAN PROYEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Cita-cita, harapan, visi, dan misi kemajuan dan kesejahteraan bersama (kesejahteraan sosial) dalam hidup, di Indonesia juga di NTT, tidak akan terwujud dengan metode proyek dan proposal donasi politik. Metode proyek dan proposal donasi politik justeru akan terus menciptakan "utang politik", ketimpangan dalam kesejahteraan sosial, bahkan hanya menyuburkan kejahatan korupsi (seperti yang terjadi di Kabupaten Kupang dan Sikka periode pembangunan 2007/2008), sambil menguburkan segala kekuatan dan potensi diri kita. Siapa yang tidak tahu, kalau kesejahteraan itu justeru hanya dialami oleh mereka yang merasa diri "berjasa" dalam menyusun proposal proyek dan donasi itu? Dinas pertanian mana yang lebih miskin dari para petani? Dinas peternakan mana yang lebih melarat dari para peternak? Dinas sosial mana yang tidak lebih sejahtera dari rakyat? Pemerintah dan birokrat mana yang sama miskin dengan rakyat biasa? LSM mana yang sama lemah dengan, atau jadi lemah karena, masyarakat?

Sejak terbentuknya NTT, sejak itu pula kita membuat proyek dan mencari donasi politik. Pemimpin demi pemimpin telah dihadirkan, dan mereka hadir dengan berbagai proyek dan proposal donasi politik, entah ke pemerintah pusat, kepada para investor, atau juga kepada para donatur yang "baik hati". Dinas-dinas dan LSM-LSM membuat data dalam angka-angka dan presentasi tentang kemiskinan, kebodohan (buta huruf), dan gizi buruk, lalu ditulis, disebarluaskan sebagai tulisan ilmiah di media-media tersohor, semacam *kompas*, lalu disusun proposal ke pusat negara dan pendonor (investor) untuk menghadirkan proyek, mendatangkan dana membiayai proyek pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan gizi buruk. Semua proyek dijuduli "pemberdayaan" masyarakat. Semua donasi dikemis dengan kata "bantuan kemanusiaan". Apa hasilnya?

Rakyat biasa tetap seperti biasa: tidak berdaya, bodoh, penyakitan, bahkan semakin menderita karena kehilangan hak-hak mereka. Yang semakin kuat, semakin cerdas, semakin sehat, dan "tampil depan" modern hanya tampak pada rakyat "luar biasa": kaum birokrat, politisi, penegak hukum, pengusaha-pengusaha yang kaya kolusi, juga LSM-LSM. Jangan heran kalau di NTT ini, menjadi birokrat, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan harapan utama begitu banyak orang. Ini sesungguhnya adalah sebuah kemerosotan peradaban, karena dengan itu generasi kita telah dikeluarkan dari diri mereka, dan ingin hidup dari apa yang diciptakan oleh yang lain, hidup modern yang palsu: menjadi modern di *depan*, tetapi kolot di *belakang*, modern di wajah dan penampilan, tetapi kolot di otak dan kreativitas. Banyak orang telah menolak ramalan Karl Marx tentang runtuhnya peradaban manusia karena alienasi diri, tetapi, ramalan itu sebenarnya sedang mewujudkan dalam sejarah kehidupan rakyat NTT.

Investasi Dasar untuk Mencapai Kesejahteraan

Kekecewaan terhadap praksis politik yang gagal dan tidak adil tentunya sah-sah saja sebagai ekspresi kesadaran politik yang sehat. Namun, kekecewaan itu tentunya tidak perlu menjadi alasan untuk menolak hirarki politik seperti yang pernah digagaskan Karl Marx. Saya berpikir, kegagalan politik di NTT pada dasarnya bersumber dari kegagalan individu-individu dalam mengaktualisasikan diri. Dalam pengamatan saya, yang membuat kita (tetap) miskin adalah lemahnya kreativitas dan minimnya produktivitas. Dengan demikian, bukan (terutama) korupsi yang membuat orang NTT miskin. Korupsi hanya menjadi sebab dari "tidak majunya" NTT ke arah yang lebih teknologis, lebih fasilitatif seperti propinsi-propinsi lain di Indonesia.

Berbagai macam proyek, investasi, dan donasi politik pada prinsipnya adalah baik. Namun, semua itu merupakan *fasilitasi* politik yang bertujuan untuk menggerakkan aktivitas, kreativitas, dan produktivitas individu-individu. Meskipun harus diakui bahwa ada segelintir orang yang membiayai hidupnya dari sebagian (besar) proyek, investasi, dan donasi itu dan itu harus tetap dikecewakan dan dilawan namun, paling kurang, tetap ada jatahnya bagi rakyat untuk memfasilitasi usaha, kreativitas, dan produktivitas. Demi progresivitas upaya kesejahteraan, konsentrasi pada efektivitas penggunaan berbagai fasilitas politik yang "tersisa" itu merupakan hal

yang urgen diperhatikan oleh segenap rakyat NTT. Dengan demikian, korupsi tetap dilawan, tetapi rakyat harus tetap secara efektif menggunakan "sisa" dari korupsi itu untuk sungguh-sungguh mendongkrak, mendorong, dan memfasilitasi berbagai usaha dan kreativitas pribadi. Hal ini bukan sikap "menyerah" terhadap ketidakadilan dan korupsi, tetapi justru merupakan satu langkah *renunsiatif* (penyangkalan) yang produktif terhadap ketidakadilan dan korupsi, dan juga sebagai alternatif yang hemat saya lebih mudah dibuat daripada mencari, mengejar, dan menuntut hukuman bagi para koruptor siluman di NTT ini.

Awal dari proses aktualisasi diri yang kreatif dan produktif adalah belajar. "Eksplorasi" dan pantauan Harian Umum *Pos Kupang (PK)* yang terangkum dalam berbagai kemasan berita seputar potensi dan kekayaan yang ada atau diadakan di NTT, di kampung-kampung, mungkin dapat dijadikan dasar untuk menegaskan sikap alternatif ini. NTT (Timor dan Sumba) punya potensi peternakan yang pernah diakui secara nasional. NTT (Flores, Lembata, Solor, dan Adonara) punya potensi pertanian (perkebunan) yang cukup prospektif bagi kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Publikasi berbagai macam potensi ini tentunya merupakan sebuah "sinisme" sosial dan otokritik yang progresif yang luar biasa tajamnya bagi kita orang NTT. Kita yang miskin, kita yang penyakitan, kita yang bodoh, dan kita juga yang "menyindir" kenyataan itu. Apakah ini juga merupakan kebodohan? Bukan! Ini adalah kecerdasan dan inteligensi baru yang mesti diakui. Ini adalah konsientisasi energik yang bakal membawa kita kepada perubahan spektakuler dalam koridor kerinduan akan kesejahteraan. Yang telah dibuat *PK* adalah matahari kesadaran yang menggugah dan menggugat rasionalitas kehidupan kita. Eksplorasi potensi yang (terus) dibuat *PK* dari kampung ke kampung di seluruh NTT ini, adalah sebuah pendidikan luar biasa bagi kita semua saat ini.

Hanya satu yang dapat saya temukan sebagai isi utama pendidikan itu, yakni sebuah komitmen belajar. Kita semua orang NTT sedang diajak untuk belajar. Ajakan ini sangat substansial, karena kita sudah menyadari paradoks kehidupan kita, bahwa kita miskin di tengah cukup banyak potensi kekayaan yang kita miliki. Kita penyakitan di tengah cukup banyak sarana kesehatan yang sudah disediakan. Kita merantau mencari kerja di tengah begitu banyak lahan kerja yang kita miliki (HU Pos Kupang, 20/9/2008, HU Kompas, 22/8/2008). Kita "bodoh"

di tengah cukup banyak sarana dan prasarana pendidikan. Apa yang kurang? Ya, kita belum memiliki komitmen untuk belajar.

Belajar di sini bukanlah mengambil buku lalu membaca semua yang tertulis di sana, bukan juga pergi ke sekolah lalu mendengar apa yang disampaikan oleh para guru. Itu juga bentuk-bentuk belajar. Tetapi, belajar yang sesungguhnya adalah disposisi diri yang mau menerima apa yang ada, mau mendalami, mengolah, dan mengembangkan apa yang diberikan demi pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai manusia ((HU Pos Kupang, 20/9/2008).

Persoalan Kita

Pertama, keengganan untuk menerima ke-*ada-an* kita sebagai petani atau peternak merupakan sebab dari kecenderungan sebagian orang terdidik dari antara kita untuk tidak pulang kampung atau pulang ke desa setelah meraih profesionalisme tertentu. Sarjana yang pulang kampung dianggap bahkan diolok kampung dan tidak berbobot. Lebih lagi, pandangan yang negatif terhadap apa yang ada di kampung dan di desa, mempermiskin motivasi untuk mengambil pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan ke-*ada-an* itu. Jangan heran kalau tidak banyak orang NTT yang berminat mempelajari pertanian atau peternakan. Mungkin ada yang mempelajarinya, tetapi enggan untuk pulang kampung dan menjadi petani atau peternak, atau paling kurang menjadi penggerak intensif yang selalu ada bersama para petani atau peternak di desa-desa dan kampung-kampung.

Sampai sekarang belum banyak dilihat atau dipublikasikan mengenai petani atau peternak yang adalah sarjana pertanian atau peternakan. Para sarjana kebanyakan ada di kantor-kantor pemerintahan. Apa yang mereka buat? Ya, mereka juga beternak, tetapi bukan sapi, bukan babi, bukan ayam yang mereka ternakan, melainkan rakyat. Para petani dan peternak adalah ternakan para sarjana peternakan dan pertanian (baca: para birokrat umumnya). Jangan heran kalau angka korupsi semakin tinggi. Mereka membuat banyak anggaran, menciptakan banyak proyek untuk memfasilitasi aktivitas pertanian dan peternakan, tetapi tidak pernah diketahui sampai sekarang bahwa ada petani dan peternak yang sukses karena proyek-proyek itu, dan proyek-proyek itu sendiri justeru banyak yang manipulatif, tidak tuntas dikerjakan, atau tuntas tetapi bermutu rendah sehingga tidak cukup untuk memfasilitasi kebutuhan rakyat (HU Pos Kupang, 26/9/2008).

Tanda-tanda kesuksesan justeru dilihat pada mereka yang merancang anggaran dan menciptakan proyek-proyek itu (pemerintah/birokrat).

Kedua, kisah mengenai pabrik atau industri yang sudah menjadi almarhum di NTT, seperti Pabrik Semen Kupang, industri sabun di Waiwerang Adonara dan Maumere, adalah "kesaksian" paling konkret dari lemahnya kemampuan kita untuk mendalami, mengolah, dan mengembangkan apa yang kita terima (HU Pos Kupang, 13/9/2008). Kita kurang suka menerima ke-*ada-an* otentik kita, dan kita senang menerima apa yang diberikan orang lain untuk keberadaan kita. Tetapi, kita gagal (kurang cerdas) mengolah dan mengembangkan semua yang diterima. Apa yang diterima langsung disantap habis, lalu menanti pemberian berikutnya. Apakah ini yang disebut filsuf Nietzsche sebagai "mental hamba"? Apakah ini yang disebut Karl Marx sebagai alienasi diri? Entahlah! Tetapi, yang pasti kegagalan kita untuk mempertahankan kelangsungan hidup industri-industri yang sangat berhubungan dengan pengembangan dari apa yang ada pada kita itu, adalah kegagalan dari komitmen kita untuk belajar mendalami dan mengembangkan apa yang diberikan kepada kita. Komitmen ini memang berat untuk dihayati dan diwujudkan, karena dengan komitmen ini kita seakan harus memaksa diri untuk bekerja keras dan bekerja cerdas pada yang ada dan dengan semua yang ada.

Belajar untuk bekerja keras dan bekerja cerdas adalah investasi dasar bagi kesejahteraan. Revolusi ilmu pengetahuan modern, revolusi industri di Eropa, dan sejarah kapitalisme dunia yang sekarang menjadi sistem-sistem yang juga mempengaruhi hidup kita, sesungguhnya lahir dari sebuah komitmen belajar yang ada pada pribadi-pribadi tertentu. Ada pribadi-pribadi yang telah mengambil sikap tegas bagi diri untuk bekerja keras dengan suatu kecerdasan rasional. Mereka bekerja dengan tekun, sistemik, dan terencana, sambil berpikir bagaimana mengembangkan pekerjaan, dan lebih lagi berpikir bagaimana mengembangkan kemampuan kerja itu sendiri. Dengan itu, ketika mereka bekerja pada suatu pekerjaan yang diberikan atau disediakan orang lain, tidak selamanya mereka menjadi pekerja bagi yang lain, tetapi juga menjadi orang yang sanggup menciptakan pekerjaan sendiri berdasarkan apa yang sudah dikerjakan. Max Weber (1864–1920) sudah membuktikan ini sebagai awal dari kesejahteraan masyarakat Eropa Barat pada masanya.

KESIMPULAN

Saatnya sekarang kita orang NTT mengakhiri mental hamba pada pekerjaan orang lain (juga birokrasi pemerintahan). Kita membangun investasi baru: membangun komitmen belajar untuk bekerja keras dan cerdas pada semua yang ada dan dengan semua yang sudah kita miliki. Dengan komitmen ini kita tidak lagi menggantungkan kesejahteraan pada proyek-proyek, donasi-donasi politik, hibah, bahkan bantuan langsung ala BLT tetapi pada diri kita dan semua yang ada pada kita. Sebanyak apapun proyek, sebesar apapun donasi politik atau bantuan dari orang lain, semuanya tidak akan pernah membawa kesejahteraan jika tidak dihadapi dengan komitmen diri untuk belajar dalam dan dari semua itu.

James Watt dkk, tentu akan tersenyum bahagia dari surga, jika para petani, peternak, nelayan, dan penenun ikat di seluruh NTT segera menarik diri dari *depan* yang palsu, ke *belakang* yang sejati, dari modernisme yang manipulatif ke modernisme otentik, dari kekuatan proyek dan donasi politik ke pergumulan kemampuan diri yang kreatif dan produktif.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditjondro, G.J. 2002. *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta.
- "Ensiklopedi Nasional Indonesia". 2004. Jakarta: PT Delta Pamungkas.
- Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Murder, N. 1999. "Prinsip Dasar Hidup Sehari-hari", dalam *Agama, Hidup Sehari-hari, dan Perubahan Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Rapar, J.H. 1988. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Pers.
- "Revolusi Inggris": http://www.e-dukasi.net/mo_full.php?moid=104&fname=sej201_07.htm.
- Schmandt, H.J. 2002. *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thompson, Dennis, F. 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Obor.
- Kompas* 22/8/2008.
- Pos Kupang*, 20/9/2008;
- Pos Kupang*, 24/9/2008.
- Pos Kupang*, 26/9/2008.
- Pos Kupang*, 13/9/2008.